

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN  
TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2007**

**Widya Astuti Mustikarini  
Debby Fitriasaki**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ABSTRAK**

Research related to factors that affect the performance of local government (LG) has not been done in Indonesia. Therefore, this study tries to prove whether the characteristics of LG (the size, the level of wealth, the dependence level and the government expenditures) affect the LG performance (scores of Local Government Performance Evaluation/EKPPD which is the main source from Local Government Performance Reporting/LPPD). In addition, this study also wants to prove the influence of audit findings to the LG performance. By using multiple regression methods to the 275 LGs for year 2007, this study provides evidence that the size, the level of wealth, and the dependence level have positive effect on LG performance. While government expenditures and the audit findings have negative effect on LG performance.

Keywords: Characteristic of Local Government, Local Government Performance, Local Government Performance Reporting, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Audit Findings.

**1. PENDAHULUAN**

Desentralisasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 mengalihkan berbagai macam kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Sebagai implikasinya, peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemda.

UU No. 32/2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Untuk melengkapi PP No. 6/2008, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil dari EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pertama kalinya diselenggarakan untuk LPPD tahun anggaran 2007.

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan LPPD suatu Pemda sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (fraud). Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Penelitian terkait dengan karakteristik Pemda, temuan audit BPK dan kinerja Pemda belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian tentang pengaruh karakteristik Pemda dilakukan oleh Zelda (2008) yang mengaitkannya dengan kepatuhan menyusun laporan keuangan sesuai standar, Liestiani (2008) mengaitkan dengan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rora (2010) mengaitkan dengan tingkat pengungkapan sukarela pada situs Pemda, Sumarjo (2010) mengaitkan dengan kinerja keuangan, sedangkan Purba (2006), Rustiono (2008) dan Ahmad (2011) mengaitkan karakteristik Pemda dengan kinerja ekonomi makro. Untuk variabel temuan audit, Liestiani (2008) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen terhadap tingkat pengungkapan LKPD sedangkan Fazri (2010) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel dependen yang menjadi proksi dari kelemahan pengendalian internal suatu Pemda.

Dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti ingin menguji apakah karakteristik Pemda dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemda yang diukur dengan nilai EKPPD yang sumber utama informasinya dari LPPD. Penelitian terkait dengan LPPD juga belum banyak dilakukan di Indonesia dan lebih banyak bersifat analisis deskriptif (Dalimunthe (2010), Febriana (2010) dan Dhuanovawati (2010)). Dengan demikian, penelitian ini juga bermaksud melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan LPPD dengan melakukan penelitian dalam bentuk penelitian kuantitatif yang mengaitkan karakteristik Pemda kabupaten/kota dan temuan audit BPK dengan kinerja Pemda kabupaten/kota tahun anggaran 2007.

## **2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Kerangka Teoritis**

UU No. 32/2004 memberikan kewenangan kepada Pemda untuk menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta mewajibkan Pemda untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja Pemda. Lebih lanjut, berdasarkan PP No. 6/2008 dan Permendagri No. 73/2009 disebutkan bahwa salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah terhadap Pemda berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama.

Pasal 2 PP No. 3/2007 menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan wajib dan pilihan), tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut.

Semakin besar ukuran Pemda maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Pemda tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki Pendapatan Asli daerah (PAD) beragam yang salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Pemda yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik. Setiap Pemda juga akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang beragam disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing Pemda. Pemberian DAU akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar DAU maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga hal ini diharapkan akan membuat Pemda semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar DAU akan membuat kinerja Pemda semakin baik. Selain dari sisi pendapatan, karakteristik Pemda bisa juga dilihat dari sisi belanja Pemda yang juga beragam disesuaikan dengan besarnya pendapatan yang dimilikinya. Semakin besar belanja Pemda seharusnya diharapkan akan semakin meningkat pelayanan yang diberikan oleh Pemda tersebut untuk masyarakatnya sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pemda tersebut.

Keempat karakteristik di atas merupakan item-item yang terdapat dalam suatu laporan keuangan Pemda yang wajib diaudit oleh BPK. Pemeriksaan BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimana salah satu hasil dari pemeriksaan berupa temuan audit. Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemda tersebut, yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD, kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemda tersebut. Gambar 1 menunjukkan kerangka teoritis dari penelitian ini.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010) bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

**Hipotesis 1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.**

Saragih (2003) dalam Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda.

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Lin *et. al.* (2010) yang menemukan bahwa pendapatan Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda di Cina. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

**Hipotesis 2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.**

Selain ukuran dan tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan Pemda kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari alokasi DAU sehingga hal ini memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik. Dengan demikian, semakin tinggi ketergantungan Pemda pada pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Sumarjo (2010) yang mengungkapkan bahwa *intergovernmental revenue* (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Begitu juga dengan penelitian Ahmad (2011) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini adalah:

**Hipotesis 3: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.**

Jika ketiga karakteristik di atas terkait dengan kekayaan dan pendapatan Pemda maka karakteristik keempat ini akan dilihat dari sisi belanja Pemda. Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja Pemda seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi skor kinerja Pemda tersebut.

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan Rustiono (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga dengan Sjoberg (2003) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan investasi dengan kinerja ekonomi makro di Swedia selama kurun waktu 1960-2001. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

**Hipotesis 4: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.**

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda.

Penelitian yang menghubungkan temuan audit langsung dengan kinerja Pemda belum ada. Namun penelitian yang dilakukan oleh Bernstein (2000) menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Dengan demikian, hipotesis terakhir penelitian ini adalah:

**Hipotesis 5: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.**

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Model Penelitian dan Definisi Operasional**



Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{SCORE}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{TA}_{it} + \beta_2 \text{PAD}_{it} + \beta_3 \text{DEPEND}_{it} + \beta_4 \text{BD}_{it} + \beta_5 \text{TEMUAN}_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = koefisien variabel independen

$\varepsilon$  = koefisien error

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  > 0

$\beta_5$  < 0

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang berasal dari Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPPD Tahun 2007 Tingkat Nasional dengan *range* nilai 0-4. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian portfolio secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2007 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah. Evaluasi pemingkatan kinerja Pemda ini baru pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggaran 2007 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2009 oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk definisi operasional masing-masing variabel independen bisa dilihat di Tabel 1.

### 3.2. Sampel dan Data Penelitian

Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah Pemda daerah kabupaten/kota yang dipilih memiliki semua data yang lengkap meliputi: Neraca untuk mendapatkan total aset, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, dan total realisasi anggaran pendapatan, serta memerlukan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2007 untuk mendapatkan jumlah temuan audit. Jumlah sampel akhir sebanyak 275 Pemda kabupaten/kota dengan proses pengambilan sampel bisa dilihat di Tabel 2.

Data untuk variabel temuan audit BPK didapatkan dari Ikhtisar Pemeriksaan semester I dan II tahun 2008 pada *website* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemda

terhadap peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2007. Penelitian ini menggunakan data *cross section* dengan LPPD dan LKPD yang telah diaudit periode yang sama yakni tahun anggaran 2007.

## 4. HASIL DAN ANALISIS DATA

### 4.1. Deskripsi Statistik dan Uji Beda Rata-Rata

Di Tabel 3 dapat dilihat deskripsi statistik dari variabel dependen dan independen untuk 275 sampel penelitian. Nilai rata-rata skor kinerja sebesar 1,85 yang berarti secara rata-rata kinerja Pemda masih kurang baik karena berada pada kriteria prestasi sedang. Pemda yang memiliki skor kinerja tertinggi untuk tahun anggaran 2007 adalah Kabupaten Boyolali (Provinsi Jawa Tengah).

Daerah yang memiliki jumlah aset atau ukuran terbesar adalah Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) sedangkan daerah yang jumlah asetnya terkecil adalah Kabupaten Halmahera Barat (Provinsi Maluku Utara). Rata-rata nilai rasio PAD Pemda adalah sebesar 5% yang berarti secara rata-rata porsi PAD pada total pendapatan Pemda masih sangat kecil. Pemda yang memiliki porsi PAD terbesar adalah Kota Tegal (Provinsi Jawa Tengah). Kebalikan dari nilai PAD, dengan nilai rata-rata DEPEND sebesar 65% menandakan bahwa porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam total pendapatan Pemda untuk tahun anggaran 2007 masih sangat besar. Hal ini juga menandakan bahwa ketergantungan Pemda kabupaten/kota di Indonesia terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi karena nilainya di atas 50%. Apabila dilihat dari sisi belanja daerah, Pemda dengan belanja terbesar adalah Kabupaten Bandung (Provinsi Jawa Barat) sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Pakpak Bharat (Provinsi Sumatera Utara). Untuk variabel temuan audit, nilai rata-rata sebesar 0,04 yang artinya secara rata-rata temuan audit di Pemda kabupaten/kota tahun 2007 adalah sebesar 4% dari total anggaran belanja. Pemda yang temuan auditnya tertinggi adalah Kabupaten Sintang

(Provinsi Kalimantan Barat) sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Temanggung (Provinsi Jawa Tengah).

Selanjutnya dilakukan pengujian beda rata-rata untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata skor kinerja dari dua kelompok sampel penelitian yang dilihat dari setiap variabel independennya. Pengujian beda rata-rata ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel skor kinerja dan bagaimana arah dari pengaruh tersebut. Dalam melakukan uji beda rata-rata, sampel dibagi menjadi dua kelompok Pemda (Pemda dengan rata-rata skor kinerja tinggi dan rata-rata rendah) menggunakan data median masing-masing variabel independen.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa kedua kelompok Pemda memiliki beda rata-rata yang signifikan untuk variabel ukuran dan kekayaan daerah (tingkat keyakinan 99%) serta temuan audit BPK (tingkat keyakinan 95%). Dari Tabel 4 tersebut dapat juga kita lihat bahwa kelompok Pemda dengan ukuran dan kekayaan daerah yang besar memiliki rata-rata nilai skor kinerja yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok Pemda dengan ukuran dan kekayaan daerah yang kecil. Hal ini bisa menjadi indikasi awal bahwa terdapat hubungan yang positif antara ukuran dan kekayaan daerah dengan kinerja Pemda. Sedangkan untuk variabel temuan audit dapat kita lihat indikasi awal hubungannya yang negatif dengan skor kinerja karena kelompok Pemda dengan temuan audit yang besar memiliki rata-rata skor kinerja yang lebih rendah dibanding kelompok Pemda dengan temuan audit yang kecil.

#### **4.2. Pengujian Model Penelitian**

Sebelum dilakukan pengujian regresi, peneliti telah melakukan uji asumsi klasik. Hasil dari tes asumsi klasik adalah dalam model penelitian tidak terdapat masalah multikolinearitas maupun heteroskedastisitas.

Selanjutnya, apabila kita lihat nilai *F-statistic* pada Tabel 5 yang nilainya lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  maka berarti semua variabel independen penelitian secara bersama-sama

berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2007. Sedangkan jika dilihat dari nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang sebesar 9,4% berarti hanya 9,4% variasi skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang dapat dijelaskan oleh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit. Sedangkan 90,6% variasi skor kinerja Pemda kabupaten/kota dijelaskan oleh variabel-variabel di luar variabel independen penelitian ini.

#### 4.3. Pengujian Hipotesis

Apabila dilihat dari Tabel 5, semua variabel independen penelitian ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen yaitu skor kinerja Pemda kabupaten/kota tahun anggaran 2007. Arah dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semuanya sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah.

Ukuran Pemda yang diproksi dengan nilai ln total aset berpengaruh **positif signifikan** terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 99%. Hal ini berarti semakin besar ukuran daerah maka semakin tinggi skor kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan sejalan dengan penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Tingkat kekayaan daerah yang diukur melalui nilai PAD terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh **positif signifikan** terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 90%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin tinggi skor kinerja daerah tersebut. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Lin *et. al.* (2010) yang meneliti tentang pengaruh kekayaan daerah terhadap indeks kinerja ekonomi di Cina.

Pengaruh variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota juga sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh **positif signifikan** pada tingkat keyakinan 90%. Artinya, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka semakin tinggi skor kinerja Pemda. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sumarjo (2010) dan Ahmad (2011). Penelitian ini juga berhasil membuktikan hipotesis awal yang dibuat yaitu variabel temuan audit BPK berpengaruh **negatif signifikan** terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 90%. Artinya, semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu Pemda maka semakin rendah skor kinerja Pemda tersebut.

Sedangkan untuk variabel belanja daerah, penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 99%. Namun arah dari pengaruh variabel ini ternyata tidak sesuai dengan hipotesis, yaitu variabel belanja daerah ternyata terbukti berpengaruh **negatif signifikan**. Artinya semakin besar belanja daerah ternyata menyebabkan semakin kecil nilai skor kinerja Pemda tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Purba (2006) dan Rustiono (2008).

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan dan Implikasi**

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa karakteristik suatu pemerintah daerah (Pemda) dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2007. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemda dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan

daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda.

Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi kepada Pemda kabupaten/kota bahwa:

1. Pemda dengan ukuran dan kekayaan asli daerah (PAD) yang besar seharusnya memiliki nilai skor kinerja yang tinggi. Jika Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar ternyata memiliki nilai skor yang rendah maka Pemda tersebut harus sadar dan mawas diri bahwa kinerjanya berarti lebih tidak baik dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang memang lebih kecil. Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemda dengan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pusat (dana alokasi umum/DAU besar) membuat Pemda semakin berhati-hati dalam melaksanakan tugas pelayanannya kepada masyarakat karena merasa diawasi oleh pemerintah pusat. Namun hal ini seharusnya tidak menjadikan Pemda dengan DAU yang kecil untuk memberikan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat karena Pemda dengan DAU yang kecil biasanya memiliki kekayaan asli daerah (PAD) yang besar. Sehingga sesuai dengan implikasi pada poin 1, dengan PAD yang besar maka kinerjanya juga dituntut semakin baik.
3. Hasil dari penelitian ini terkait dengan temuan audit BPK menunjukkan bahwa Pemda harus lebih berhati-hati dalam masalah pengelolaan keuangan negara karena hal ini tidak hanya terkait dengan masalah secara akuntansi saja tapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
4. Berdasarkan penelitian ini, Pemda dengan total belanja yang besar ternyata membuat kinerjanya semakin tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pengeluaran

Pemda lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, Pemda harus bisa mengelola belanjanya dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran yang lebih produktif dan bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, bukan dalam bentuk belanja yang sifatnya rutin dan tidak memberikan nilai tambah.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

1. Laporan Hasil Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2007 Tingkat Nasional diterbitkan tanggal 14 Agustus 2009. Pada saat penelitian dilakukan, Laporan Hasil Pemeringkatan untuk tahun 2008 belum diterbitkan, sehingga penelitian ini menggunakan hasil evaluasi untuk LPPD tahun anggaran 2007 saja.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data skor kinerja untuk beberapa tahun karena penilaian skor kinerja ini dilakukan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun.

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan 9,4% variabel dependen. Dengan demikian 90,6% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel yang lain seperti misalnya tingkat pertumbuhan, *leverage*, jumlah penduduk, jumlah pegawai dan jumlah fasilitas umum. Atau bisa juga menggunakan variabel-variabel yang menjadi indikator kinerja kunci (IKK) dan menjadi komponen dalam penilaian skor kinerja seperti misalnya terkait dengan kinerja keuangan Pemda dan kinerja bidang urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemda.

3. Dalam penelitian ini variabel belanja daerah diukur dengan total realisasi belanja yang terdiri dari belanja rutin dan belanja modal. Variabel ini kurang tepat digunakan untuk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan Pemda kepada masyarakatnya.

Penelitian selanjutnya lebih baik mencoba untuk menggunakan variabel belanja modal saja daripada total belanja karena belanja modal biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

### DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Irdam. (2011). *Regional Fiscal Independence In East Java Province Post Regional Autonomy. Economic Journal of Emerging Markets*.
- Arens, Alvin A. (2008). *Auditing and assurance services: an integrated approach*. Ed.12th. Pearson Education: USA.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2008*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 15 Juli 2011.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2008*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 15 Juli 2011.
- Bernstein, J David. (2000). *Local government measurement use to focus on performance and results. Evaluation and Program Planning 24 (2001) 95-101*. USA.
- Cahya, M Anggi. (2010). *Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Tasikmalaya*. Skripsi Sarjana. UNIKOM.
- Dalimunthe, Tigor Mulia. (2010). *Review Kinerja Pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Dhuanovawati, Morgan. (2010). *Analisis Atas Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah Untuk Tahun Anggaran 2008*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Depdagri. (2009). *Sosialisasi Manual EKPPD TA 2008 Implementasi PP Nomor 6 Tahun 2008. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan EKPPD*. Pasuruan Jawa Timur.
- Febriana, Annisa. (2010). *Analisis Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2008*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2009). *Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2007 Tingkat Nasional*.
- Liestiani, Annisa. (2008). *Pengungkapan LKPD Kab/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., Ho, Tsai-Neng. (2010). *Applying integrated DEA/AHP to evaluate the economic performance of local governments in China. European Journal of Operational Research, 209 (2011) 129-140*.



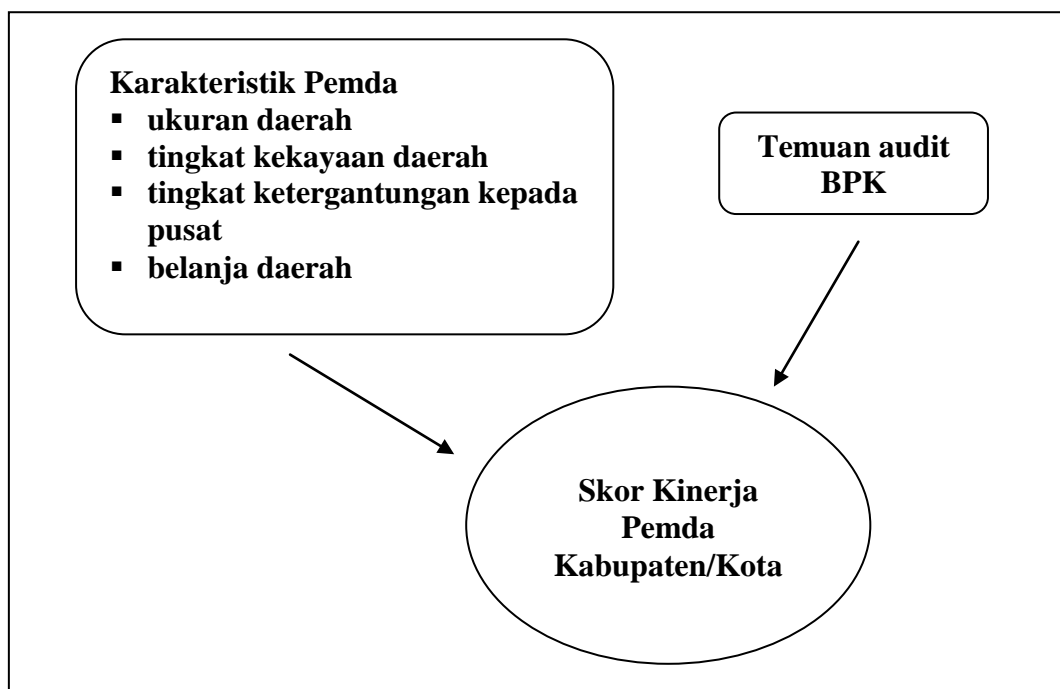
- Lowensohn, S., L. E. Johnson., R. J. Elder dan S. P. Davies. (2007). "Auditor Specialization, Perceived Audit Quality, and Audit Fee in the Local Government Audit Market." *Journal Of Accounting and Public Policy*, 26 705-732.
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.1*. Hal 1-17. <http://www.bppk.depkeu.go.id>.
- Ormond, D., and Loffler, E. (2002). *New Public Management: What to Take and What to Leave*. Public Management Service. OECD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Purba, Adearman. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun*. Tesis Pasca Sarjana. USU. Medan.
- Puspita, Rora. (2010). *Pengaruh Kinerja, Ketergantungan, dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Situs Pemda Tahun 2010*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Robbins, Walter A., Austin, Kenneth R. "Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure". *Journal of Accounting Research*. Vol. 24. No. 2. pp. 412-421.
- Rustiono, Deddy. (2008). *Analisis Pengaruh Investasi , Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis S2. USU. Medan.
- Santoso, Singgih. (2000). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Jonathan. (2008). *Panduan Lengkap Untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Andi. Jakarta.
- Sjoberg, Peter. (2003). *Government Expenditure Effect on Economic Growth: The Case of Sweden 1960-2001*. Lulea University of Technolgy.
- Stanbury, W.T. (2003). *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute Digital Publication. Canada.
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia..* Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Zaelani, Fazri. (2010). *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, Dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2008*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.

Zelda, Retina. (2008). *Tingkat Kepatuhan Pemda/Kota Di Indonesia Terhadap PP No 24 Tahun 2005 Dan Hubungannya Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan Total Aktiva*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.

## LAMPIRAN

**Gambar 1. Faktor Penentu Skor Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**



Sumber: Olah data peneliti

**Tabel 1. Definisi Operasional dan Arah Hipotesis**

Variabel	Keterangan	Ukuran Variabel	Hipotesis
<b>SCORE</b>	Skor kinerja Pemda	Skor kinerja Pemda	
<b>TA</b>	Ukuran Pemda	ln (total aset Pemda)	+

<b>PAD</b>	Tingkat Kekayaan Daerah	PAD/Total pendapatan	+
<b>DEPEND</b>	Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	DAU/Total pendapatan	+
<b>BD</b>	Belanja Daerah	ln (total realisasi belanja)	+
<b>TEMUAN</b>	Temuan Audit	Temuan audit (dalam rupiah) /Total anggaran belanja	-

**Tabel 2. Proses Pengambilan Sampel Jumlah Pemda**

	<b>Jumlah Pemda Kab/Kota</b>
Jumlah seluruh Pemda tahun 2007	469
Pemda setingkat provinsi	(33)
Pemda yang tidak menyampaikan LPPD 2007	(25)
Pemda dengan data tidak lengkap	(110)
Jumlah pemda kota/kabupaten dengan data lengkap	301
Data <i>outlier</i>	(26)
Jumlah sampel akhir dalam penelitian	275

Sumber: Olah data peneliti

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

<b>N = 275</b>	<b>Mean</b>	<b>Maximum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Std. Dev.</b>
<b>SCORE</b>	1,85	3,41	0,23	0,69
<b>TA (Rp. miliar)</b>	1.320,39	5.574,19	134,66	967,62
<b>PAD</b>	0,05	0,18	0,00	0,03
<b>DEPEND</b>	0,65	0,84	0,04	0,13
<b>BD (Rp. miliar)</b>	540,08	1.799,97	206,42	270,95
<b>TEMUAN (Rp. miliar)</b>	615,97	1.956,80	41,95	325,51

Sumber : Olah Data SPSS

**Tabel 4. Hasil Uji Beda Rata-Rata**

Variabel Independen	Rata-Rata Skor Kinerja		Sig. t-test
	Rendah	Tinggi	
Ukuran Pemda	1,7269	1,9544	0,003 *
Kekayaan Daerah	1,7260	1,9645	0,004 *
Ketergantungan	1,7980	1,8901	0,127
Belanja Daerah	1,7949	1,8888	1,126
Temuan Audit	1,9309	1,7616	0,022 **

\* Signifikan pada  $\alpha = 1\%$

\*\* Signifikan pada  $\alpha = 5\%$

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi**

Variabel	Hipotesis	Koefisien	t-Statistik	Prob
C		3,161	1,145	0,253
Ln(TA)	Positif	0,335	3,443	0,001 *
PAD	Positif	2,605	1,941	0,053 **
DEPEND	Positif	0,627	1,953	0,052 **
Ln(BD)	Positif	-0,413	-3,063	0,002 *
TEMUAN	Negatif	-1,242	-1,884	0,061 **
<i>Adjusted R-square</i>		0,094		
<b>F-statistic</b>		6,666		
<b>Prob (F-statistic)</b>		0,000		

\* Signifikan pada  $\alpha = 1\%$

\*\* Signifikan pada  $\alpha = 10\%$

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Widya Astuti Mustikarini  
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 10 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Menikah  
Alamat Rumah : Komplek Deppen Blok GG No 15  
RT 002/11, Harjamukti  
Cimanggis – Depok, 16954  
No. Telepon : 0856 11 295 11  
E-mail : widsukses@yahoo.com



### Riwayat Pendidikan

- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, S1 Ekstensi Jurusan Akuntansi, 2009
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, D3 Jurusan Akuntansi Teknologi Sistem Informasi, Depok, 2005

### Pengalaman Kerja

Mei 2011 – Sekarang : Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta  
November 2009 – April 2011 : Rektorat UI  
Mei 2009 – Oktober 2009 : Dekanat FE UI  
Oktober 2008 – April 2009 : Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi UI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### KETERANGAN PERORANGAN

**Nama Lengkap** Debby Fitriasaki S.E., MSM  
**NIP** 060603075  
**Tanggal Lahir / Umur** 14 September 1977 / 34  
**Tempat Lahir** Jombang  
**Jenis Kelamin** Wanita  
**Agama** Islam  
**Status Pernikahan** Menikah  
**Alamat Rumah** Kota Kembang Depok Raya (Grand Depok City), Sektor Puri Insani 2 A2 No. 5, RT/RW 007/004, Jatimulya, Sukmajaya, Depok  
**Kode Pos** 16423  
**No. Telepon** 021-70880740  
**No. HP** 08129293004  
**E-mail** dfsari@gmail.com



### PENDIDIKAN

NO.	NAMA PENDIDIKAN	JENJANG	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT
1	Fakultas Ekonomi UI	S1	Akuntansi	2000	Depok
2	Fakultas Ekonomi UI	S2	Manajemen Keuangan	2006	Depok

### PENELITIAN / RISET

NO.	PENELITIAN - KET - INSTANSI/MITRA	WAKTU RISET	PENELITI
1	TAMF Project Economic Sector Survey <i>Departemen Akuntansi</i> Mitra: TAMF Australia	Mei 2008 ~ Nov 2008	<b>Dwi Martani</b> , Christine, Yulianti, Debby Fitriasaki, Dina Nagib, Telisa, Vid A.
2	Penelitian kolaborasi UI - Pemkot Depok. Judul penelitian: Aksesibilitas dan Akseptabilitas Kredit Perempuan Pelaku Usaha (Studi Kasus di Kota Depok, Jawa Barat) <i>Universitas Indonesia</i>	Jul 2008 ~ Feb 2010	<b>Ida Ruwaida Noor</b> , Lidya Triana, Debby Fitriasaki, Ririen S.P, Berti
NO.	PENELITIAN - KET - INSTANSI/MITRA	WAKTU RISET	PENELITI
3	Penelitian Riset Unggulan UI 2009. Judul penelitian: Analisis Pengaruh Book Tax Gap dan Pengungkapan	Feb 2009 ~ Jul 2010	<b>Dwi Martani</b> , Yulianti, Debby Fitriasaki

	PSAK 46 terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 1999 - 2007 <i>Universitas Indonesia</i>		
4	Kajian dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Depdiknas <b>Tidak dipublikasikan</b> <i>Departemen Pendidikan Nasional</i>	Okt 2009 ~ Des 2009	<b>Ronny K. Moentoro,</b> Debby Fitriasaki, Nanda Ayu W
5	Penelitian Hibah Riset Awal UI 2011. Judul penelitian: Efek Environmental Uncertainty terhadap Perilaku Oportunistik Manajemen <i>Universitas Indonesia</i>	April 2011 ~ Nov 2011	<b>Rahfiani Khairurizka,</b> Vera Diyanti, Debby Fitriasaki

#### PUBLIKASI

NO.	JUDUL	PERAN (Jmlah Anggota)	TAHUN	KETERANGAN
1	Pengaruh Aktivitas dan Financial Literacy Komite Auidit terhadap jenis Manajemen Laba	Perorangan (0)	2007	Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanudin Makasar
2	Influence of Book Tax Gap towards Earnings Persistence and Firm Value For the Period of 1999 – 2007	Anggota (2)	2010	Dipresentasikan pada The 3rd International Accounting Conference & The 2nd Doctoral Colloquium di Bali
3	Book-Tax Gap: Evidence From Indonesia	Anggota (2)	2011	Dipublikasikan pada China-USA Business Review Volume 10, No. 4, April 2011, ISSN 1537-1514